

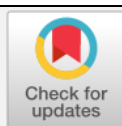
Konflik Plasma Sawit dan Politik Klientelisme di Desa Tanjung Labu Pulau Lepar

Hosea Alfandi Irawan ^{1*}, Robing¹

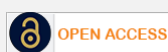
¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33126, Bangka Belitung-Indonesia
Coesspending Author: hoseaalfandiirawan@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 20 September 2025;
Diterima: 28 September 2025;
Dipublikasi: 30 September 2025;



Copyright © 2025. Owned by Author(s), published by Polikrasi

This is an open-access article. License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:

Irawan, H., A. & Robing, R. (2025). Konflik Plasma Sawit dan Politik Klientelisme di Desa Tanjung Labu Pulau Lepar. *Journal of Politics and Democracy*, 5(1), 14-24

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik agraria yang berlangsung di Desa Tanjung Labu, Pulau Lepar, akibat tidak terealisasinya kewajiban perusahaan kelapa sawit untuk menyediakan 20 persen lahan plasma sejak tahun 2001. Konflik yang semula berakar pada ketidakadilan distribusi tanah kemudian mengalami pergeseran makna menjadi isu politik lokal yang dimanfaatkan dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu plasma dipolitisasi secara sistematis sebagai komoditas elektoral. Kandidat kepala desa menggunakan janji plasma untuk memperoleh dukungan masyarakat, namun setelah terpilih cenderung melunak dan berkooptasi dengan kepentingan perusahaan. Pola berulang ini menegaskan beroperasinya praktik politik klientelisme di tingkat desa, di mana janji redistribusi tanah direduksi menjadi modal simbolik tanpa realisasi substantif. Analisis politik agraria menjelaskan akar ketidakadilan struktural yang melahirkan konflik, sementara teori klientelisme dan konsep elit lokal menerangkan bagaimana isu plasma dimediasi dan direproduksi dalam logika politik desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik plasma di Tanjung Labu tidak hanya menjadi gejala kegagalan kebijakan agraria, tetapi juga telah dilembagakan sebagai aset politik yang menjaga stabilitas kekuasaan elit sekaligus menghambat penyelesaian konflik secara substantif.

This study examines the agrarian conflict in Tanjung Labu Village, Lepar Island, triggered by the oil palm company's unfulfilled obligation to provide 20 percent of plantation land as plasma since 2001. What initially emerged as an agrarian justice issue has gradually shifted into a political instrument repeatedly mobilized in village head elections. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The



findings reveal that the plasma issue has been systematically politicized as an electoral commodity. Village head candidates employ the promise of plasma to attract community support, yet once elected they tend to soften their stance and even accommodate corporate interests. This recurring pattern highlights the operation of clientelistic politics at the village level, where promises of land redistribution are reduced to symbolic capital without substantive realization. The agrarian politics framework explains the structural inequalities underlying the conflict, while clientelism theory and the concept of local elites elucidate how the plasma issue is mediated and reproduced within the logic of village politics. The study concludes that the plasma conflict in Tanjung Labu is not merely a symptom of failed agrarian policy but has been institutionalized as a political asset that stabilizes elite power while obstructing substantive conflict resolution.

Keywords: Desa Tanjung Labu, Elit Lokal, Konflik Agraria, Plasma Sawit, Politik Klientelisme

1. Pendahuluan

Konflik agraria merupakan bentuk pertentangan yang muncul akibat perebutan akses, kontrol, dan distribusi sumber daya agraria antara masyarakat, negara, dan korporasi. Ribot dan Peluso (2003) menegaskan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa hukum kepemilikan, tetapi juga dengan relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang dapat mengakses tanah dan memperoleh manfaat darinya. Dalam konteks Indonesia, konflik agraria kerap mencerminkan ketidakadilan distribusi lahan dan marginalisasi masyarakat desa ketika berhadapan dengan korporasi maupun negara. Berangkat dari kerangka ini, penelitian ini memposisikan diri untuk mengkaji bagaimana konflik plasma di Desa Tanjung Labu tidak hanya berlangsung sebagai sengketa distribusi lahan, tetapi juga mengalami politisasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Dengan demikian, riset ini bertujuan untuk mengungkap posisi konflik plasma sebagai komoditas elektoral yang dimanfaatkan elit lokal, sekaligus menelaah bagaimana praktik politik klientelisme berperan dalam mempertahankan status quo dan menghambat penyelesaian konflik agraria secara substansial.

Dalam konteks Desa Tanjung Labu, persoalan agraria yang berawal dari janji plasma 20% bukan hanya memperlihatkan ketimpangan distribusi sumber daya, tetapi juga berubah menjadi isu politik lokal yang terus direproduksi. Konflik yang semula merepresentasikan perjuangan masyarakat atas hak agraria kemudian dimaknai ulang sebagai instrumen elektoral. Proses politisasi inilah yang membuka ruang bagi elit desa untuk memanfaatkan tuntutan plasma sebagai strategi membangun legitimasi politik, sehingga konflik agraria tidak berhenti pada arena distribusi tanah semata, melainkan merembes ke dalam dinamika kontestasi kekuasaan di tingkat desa. Sebagaimana ditegaskan oleh Borras dan Franco (2010), konflik agraria selalu terkait erat dengan relasi kekuasaan dan kepentingan politik yang mengatur distribusi serta akses atas tanah, sehingga wajar bila isu plasma di Tanjung Labu juga bertransformasi menjadi komoditas elektoral.

Dua siklus pemilihan kepala desa terakhir pada periode 2016-2022 dan 2022-sekarang menunjukkan pola perilaku yang konsisten bagaimana konflik agraria diapresiasi secara

strategis oleh kandidat hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Berdasarkan data empirik dari wawancara kualitatif, para kandidat yang paling vokal mengartikulasikan tuntutan masyarakat atas hak plasma justru menjadi representasi politik yang diandalkan. Mereka menjadi lokomotif simbolik gerakan perlawanan terhadap dominasi korporasi. Namun, begitu mereka memperoleh posisi formal sebagai kepala desa, semangat advokasi menjadi redup dan malah cenderung kompromistis atau bahkan kooptatif terhadap kepentingan perusahaan. Fenomena tersebut tidak bersifat sporadis, melainkan berulang secara nyaris ritualistik. Seperti yang dijelaskan oleh Baghdasaryan terjadi pertukaran pada keuntungan pribadi atau keuntungan klientelistik yang berlandas pada insentif material langsung seperti fenomena konflik agraria yang memberi kesan peduli dari perjuangan bersama dalam mendapatkan hak plasma 20% hingga menarik simpati dan dukungan dari masyarakat (Baghdasaryan, 2017). Namun setelah terpilih sikap dan perilaku tidak lagi memperjuangkan isu dengan serius dan jelang pemilihan berikutnya muncul gerakan yang mengangkat isu yang sama tentang plasma 20% dan pemenuhan hak masyarakat. Konflik ini menjadi modal politik elektoral lokal yang terus dimanfaatkan kandidat demi mendapatkan dukungan dan suara. Dalam hal ini isu agraria mengalami apa yang dikatakan juga oleh James C. Scott bahwa dukungan dari masyarakat kepada calon pemimpin tidak diberikan karena keyakinan terhadap program kerja atau ideologi (Scott, 1972).

Oleh karena itu, konflik agraria di Desa Tanjung Labu tidak hanya dipahami sebagai kegagalan distribusi sumber daya namun dipengaruhi oleh politik lokal yang memanipulasi konflik menjadi modal reproduksi kuasa. Penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan teoritik seperti, teori politik agraria, dan klientelisme politik untuk membedah relasi kuasa yang berlangsung secara bersamaan dan bersinergi antara aktor desa, elit politik dan etnis korporasi.

Penelitian mengenai konflik agraria dan peran elit lokal memberikan keterkaitan dalam dunia penelitian, khususnya dalam ilmu politik. Studi tentang konflik agraria sudah banyak diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian Jenie Tri Andani menjelaskan hubungan antara petani dan perusahaan benar murni kooperatif atau konflik namun berubah ubah dan saling tarik menarik malah cenderung pragmatis (Andanni et al., 2015), Penelitian Rinto Alexandro menjelaskan Hubungan antara petani dan perusahaan sawit bersifat dissosiatif dan menguat dalam konflik (Alexandro et al., 2023), Penelitian Ardiman Kelihu menjelaskan Jaringan Klientelistik keluarga di Maluku digunakan secara berulang dalam Pilkada untuk memperkuat kekuasaan keluarga dan memproduksi konflik sosial di antara pendukung dan penentang (Kelihu, 2022)

Dari penelitian penelitian terdahulu yang telah peneliti identifikasi mayoritas studi berfokus pada konflik agraria yang berkaitan dengan implementasi plasma oleh perusahaan kelapa sawit. Penelitian tersebut antara lain membahas persoalan ketidakadilan distribusi lahan, hubungan disfungsional antara petani dan korporasi serta dinamika resolusi konflik tingkat lokal dan studi lainnya menyoroti peran negara dan korporasi dalam mempertahankan status quo agraria melalui kontrol atas kekuasaan. Namun demikian, terdapat celah dalam kajian kajian tersebut, yaitu minimnya perhatian terhadap bagaimana konflik agraria justru dipolitisasi secara sistematis dalam konteks pemilihan desa, khususnya pada konflik plasma sebagai reproduksi elektoral lokal yang berulang. Belum banyak penelitian yang membahas bagaimana konflik ini digunakan sebagai modal politik oleh elit lokal yang menjanjikan penyelesaian konflik plasma dalam proses memperjuangkan hak masyarakat, namun kemudian tidak merealisasikannya setelah terpilih. Fenomena ini menjadi praktik klientelisme

desa yang terstruktur dan direproduksi secara berulang. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada dinamika politik lokal dan realisasi kuasa yang membentuk sekaligus memanfaatkan konflik hak masyarakat dan plasma di Desa Tanjung Labu sebagai komoditas elektoral dalam dua periode pemilihan kepala desa, yaitu pada tahun 2016-2022 dan 2022-sekarang. Pola relasional antara elit desa, masyarakat dan perusahaan akan ditelaah secara kritis dalam kaitannya dengan struktur kekuasaan dan degradasi perjuangan agraria masyarakat.

Penelitian ini secara tegas bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konflik plasma dan klaim hak masyarakat di Desa Tanjung Labu dipolitisasi oleh elit lokal sehingga bergeser dari isu struktural menjadi instrumen politik elektoral dalam Pilkades. Penelitian ini juga menyoroti pergeseran posisi elit dari oposisi yang semula vokal memperjuangkan hak masyarakat menjadi bagian dari struktur kekuasaan desa, yang pada gilirannya melahirkan stagnasi konflik dan melemahkan tuntutan kolektif warga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konflik agraria di Tanjung Labu tidak semata-mata mencerminkan persoalan distribusi tanah, tetapi juga merupakan arena reproduksi kekuasaan yang dikelola oleh elit lokal demi kepentingan politik jangka pendek.

2. Landasan Teori

Pemahaman atas konflik plasma di Desa Tanjung Labu yang dipolitisasi oleh elit lokal dalam kontestasi Pilkades memerlukan pijakan konseptual yang jelas. Landasan teori berfungsi menghubungkan temuan empiris dengan kerangka analitis yang lebih luas mengenai relasi kuasa, distribusi sumber daya, dan praktik politik lokal. Dalam penelitian ini digunakan tiga kerangka utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana konflik agraria direproduksi, dimobilisasi, dan dikelola sebagai komoditas elektoral.

Politik Agraria

Politik agraria pada dasarnya mengacu pada bagaimana tanah dan sumber daya agraria didistribusikan, dikuasai, serta diperebutkan oleh berbagai aktor dalam konteks sosial-politik yang tidak pernah netral. Saturnino M. Borras Jr. (2007) menjelaskan bahwa politik agraria adalah medan perjuangan yang melibatkan masyarakat, negara, dan korporasi, di mana setiap aktor membawa kepentingan yang saling bertentangan. Distribusi tanah, akses, dan kontrol atas sumber daya selalu terkait erat dengan relasi kuasa serta struktur kelas sosial (Borras, 2009). Dengan demikian, setiap kebijakan tanah pada hakikatnya merupakan hasil dari kontestasi politik, bukan keputusan teknokratis semata (Borras & Franco, 2010).

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, politik agraria dapat diamati melalui skema plasma yang secara formal dirancang untuk memberikan keadilan distribusi kepada petani. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa skema ini kerap gagal karena korporasi tetap mempertahankan kontrol utama, sementara masyarakat desa kehilangan akses riil terhadap tanah. Hall, Hirsch, dan Li (2011) menyebut kondisi ini sebagai bentuk *powers of exclusion*, di mana akses masyarakat ke tanah dibatasi melalui mekanisme regulasi, pasar, kekerasan, maupun legitimasi. Dalam kasus Desa Tanjung Labu, janji plasma 20% yang tidak pernah terealisasi sejak 2001 memperlihatkan bagaimana mekanisme kontrol perusahaan justru menghasilkan deprivasi agraria bagi masyarakat.

Lebih jauh, konflik plasma tidak hanya terkait dengan persoalan distribusi ekonomi, melainkan juga menjadi arena perebutan legitimasi politik di tingkat lokal. Sebagaimana ditegaskan oleh Peluso dan Lund (2011), konflik agraria selalu berkaitan dengan perebutan kekuasaan (*the right to control, define, and benefit from land*), sehingga aktor lokal dapat

memobilisasi isu agraria untuk memperkuat posisi politiknya. Di Tanjung Labu, isu plasma dipakai sebagai simbol perjuangan kolektif yang kemudian direduksi menjadi alat elektoral dalam pemilihan kepala desa. Dengan kata lain, politik agraria menyediakan lensa untuk melihat bahwa konflik plasma bukanlah kegagalan administratif belaka, tetapi bagian dari proses reproduksi kuasa yang melibatkan perusahaan, negara, dan elit desa.

Kerangka politik agraria ini penting untuk penelitian karena memungkinkan analisis pada dua tingkat. Pertama, pada tingkat struktural, politik agraria menjelaskan bagaimana ketidakadilan distribusi tanah muncul dari relasi kuasa yang timpang antara perusahaan dan masyarakat. Kedua, pada tingkat praksis, politik agraria membuka pemahaman bagaimana isu distribusi tersebut dipolitisasi dan digunakan sebagai modal simbolik dalam arena elektoral. Dengan demikian, politik agraria menjadi landasan utama untuk menelaah pergeseran makna konflik plasma di Desa Tanjung Labu, dari perjuangan agraria menuju komoditas politik lokal.

Politik Klientelisme

Politik klientelisme dipahami sebagai bentuk hubungan pertukaran politik yang bersifat asimetris, personalistik, dan transaksional antara patron (pemegang sumber daya) dengan klien (penerima manfaat). James C. Scott (1972) menjelaskan bahwa dalam relasi patron–klien, patron memiliki posisi dominan karena menguasai akses atas sumber daya strategis –seperti tanah, perlindungan hukum, dan fasilitas politik –sementara klien memberikan dukungan dalam bentuk loyalitas dan suara. Relasi ini tidak pernah berlangsung setara, melainkan mencerminkan ketergantungan struktural kelompok subordinat pada pihak yang memiliki kuasa distribusi.

Dalam praktiknya, politik klientelisme tidak hanya berwujud pertukaran material, tetapi juga simbolik. Edward Aspinall (2014) menunjukkan bahwa kandidat lokal sering menggunakan narasi penderitaan rakyat atau janji redistribusi sumber daya untuk membangun dukungan elektoral. Janji-janji ini seringkali hanya bertahan hingga momentum pemilihan selesai, tanpa komitmen untuk diwujudkan dalam kebijakan nyata. Klientelisme di Indonesia beroperasi melalui jejaring informal, di mana kandidat memanfaatkan isu populis untuk menciptakan kesan kedekatan dengan rakyat, meski sebenarnya relasi tersebut lebih bersifat pragmatis dan temporer.

Aspinall dan Berenschot (2019) dalam *Democracy for Sale* menegaskan bahwa klientelisme di Indonesia memiliki ciri khas berupa intensitas yang tinggi di tingkat lokal, terutama dalam pemilihan kepala desa dan pilkada. Kandidat kerap memobilisasi isu-isu kerakyatan seperti akses tanah, bantuan sosial, atau kompensasi plasma untuk memperoleh dukungan. Namun, dukungan tersebut jarang disertai dengan transformasi kebijakan karena sifatnya lebih sebagai “kontrak elektoral jangka pendek.” Dalam konteks Tanjung Labu, janji plasma 20% yang terus diangkat dalam setiap siklus Pilkades menjadi contoh bagaimana isu agraria digunakan sebagai “komoditas elektoral” yang dipasarkan untuk mendapatkan suara, tetapi tidak diimplementasikan secara substansial setelah kandidat berkuasa.

Dengan demikian, teori politik klientelisme menyediakan kerangka analitis yang penting untuk penelitian ini. Pertama, teori ini menjelaskan mengapa isu plasma terus dihidupkan menjelang pemilihan kepala desa dan menghilang setelah proses elektoral selesai. Kedua, teori ini membantu memahami dinamika relasi patron–klien antara elit desa dengan masyarakat, di mana masyarakat mendukung kandidat bukan karena visi kebijakan, melainkan karena janji konkret terkait hak agraria. Ketiga, teori ini menunjukkan bagaimana isu agraria direduksi

menjadi pertukaran politik jangka pendek, sehingga memperkuat status quo ketidakadilan distribusi tanah.

Elit Politik

Dalam studi politik lokal, elit dipahami sebagai minoritas terorganisasi yang menguasai sumber daya strategis, memiliki kapasitas memengaruhi, serta menempati posisi kunci dalam struktur sosial, baik melalui jabatan formal maupun otoritas informal. Suzanne Keller menegaskan bahwa elit bukan sekadar “kelas berkuasa” yang bersifat monolitik, melainkan jaringan aktor yang solid dan mampu mengorganisir serta mengarahkan opini maupun tindakan kolektif (Keller, 2013). Perspektif ini memperluas pemahaman elit dari sekadar pejabat formal menuju aktor penghubung atau brokers yang beroperasi di persilangan negara, pasar, dan masyarakat.

Kerja-kerja elit lokal dapat dilihat melalui berlapis dimensi kekuasaan. Pertama, konsentrasi atas sumber daya material dan institusional memberi mereka kemampuan untuk menentukan agenda publik. Sebagaimana ditunjukkan Mills (1956), penguasaan terhadap ekonomi, politik, maupun birokrasi memungkinkan elit mengendalikan arah kebijakan. Pada level desa, bentuknya tampak pada akses istimewa terhadap anggaran, izin, maupun perangkat regulasi seperti Peraturan Desa. Ketika isu plasma 20% dijadikan janji elektoral, posisi ini memberikan keleluasaan bagi elit untuk mempercepat atau justru menunda implementasi sesuai kepentingannya.

Kedua, kekuasaan elit juga ditopang oleh legitimasi dan kewenangan “abu-abu”. Lund (2006; 2016) menjelaskan bahwa hak atas sumber daya sering berjalan beriringan dengan hak untuk memerintah. Dalam konteks desa, legitimasi tidak hanya lahir dari jabatan formal seperti kepala desa, tetapi juga dari status adat, agama, atau reputasi sebagai “juru bicara rakyat”. Elit yang sebelumnya berada dalam posisi oposisi dapat mengkapitalisasi legitimasi moral ini saat kampanye, lalu mengonversinya menjadi kewenangan formal ketika terpilih.

Ketiga, peran elit lokal tampak dalam penguasaan modal simbolik dan wacana. Bourdieu (1986) menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersandar pada modal ekonomi, tetapi juga modal sosial dan simbolik. Narasi tentang “memperjuangkan plasma” menjadi modal simbolik yang memperkuat citra keberpihakan elit terhadap masyarakat. Namun, modal ini seringkali dipertahankan sebatas klaim performatif tanpa kebijakan nyata, sehingga dukungan masyarakat dapat dikunci sementara tuntutan substantif diredam.

Keempat, elit berfungsi sebagai perantara sekaligus gatekeeper bagi masyarakat dalam mengakses program negara maupun perusahaan. Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa para local brokers memiliki peran vital dalam menjembatani sekaligus memfilter aliran manfaat. Dalam kasus plasma, gatekeeping tampak pada siapa yang membentuk tim advokasi, siapa yang dilibatkan dalam negosiasi, dan bagaimana informasi atau ekspektasi warga dimanipulasi.

Kelima, dalam konteks pasca-otoritarian Indonesia, elit lokal sering terlibat dalam pola kooptasi dan rotasi peran. Hadiz dan Robison (2004) menyoroti bagaimana oposisi dapat bertransformasi menjadi koalisi kekuasaan demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik terbuka. Fenomena di Tanjung Labu memperlihatkan pola serupa, di mana kandidat vokal saat kampanye kemudian melunak setelah menjabat.

Dengan demikian, elit lokal dalam kasus Tanjung Labu dapat dipetakan ke dalam beberapa kategori: elit politik yang memegang jabatan formal seperti kepala desa atau anggota BPD, elit ekonomi yang menguasai jaringan bisnis lokal dan bermitra dengan perusahaan, serta elit

tradisional atau kultural yang memiliki otoritas moral dan simbolik di tengah masyarakat. Ketiganya berkolaborasi dalam memproduksi legitimasi, mengontrol kanal kebijakan, dan melakukan praktik brokerage dalam isu plasma. Inilah yang menjelaskan mengapa janji plasma terus-menerus menjadi narasi elektoral yang efektif namun tidak bermuara pada kebijakan nyata. Kombinasi modal institusional, simbolik, dan jaringan politik yang dimiliki elit membuat konflik agraria lebih sering dikelola sebagai aset politik ketimbang diperjuangkan sebagai agenda reforma agraria yang substantif.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami dinamika konflik plasma sawit di Desa Tanjung Labu. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan eksploratif yang bersifat *how* dan *why* (Yin, 2014), serta memungkinkan peneliti menggali fenomena secara kontekstual dan mendalam (Stake, 1995). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani, elit desa, dan tokoh masyarakat, dilengkapi dengan observasi partisipatif serta telaah dokumen desa dan arsip perusahaan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan langkah-langkah coding, kategorisasi, dan interpretasi (Creswell, 2013), dengan penekanan pada keterkaitan antara praktik politik agraria, klientelisme, dan peran elit lokal. Untuk menjaga validitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode (Denzin, 1978), sehingga dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana isu plasma dipolitisasi dan direproduksi sebagai komoditas elektoral dalam kontestasi kepala desa.

4. Hasil dan Pembahasan

Konflik agraria yang terus menerus berlangsung di Desa Tanjung Labu tidak hanya merefleksikan kegagalan dalam pendistribusian hak atas tanah, melainkan lebih jauh merupakan artikulasi dari struktur kekuasaan lokal yang berlapis dan dinamis. Konflik tersebut dibaca sebagai bagian dari relasi sosial-politik yang dimendiasi melalui interaksi kompleks antara masyarakat desa, elit lokal dan korporat perkebunan sawit yang dalam praktiknya tidak sejalan secara linear ataupun final melainkan reproduksi dalam format kontestatif. Konflik harus dipahami lebih dari hanya sengketa lahan namun dibaliknya terdapat relasi dan mekanisme patronase dan pengorganisasian simbolik konflik. Dalam hal ini, politik desa terperangkap dalam sirkularitas populisme agraria yang mana tidak pernah menyentuh dasar permasalahan. Politik agraria menjadi arena kontestasi kekuasaan yang mengakar pada relasi historis, ketimpangan sosial dan hak atas tanah serta plasma tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan lokal yang memerantai akses, legitimasi dan distribusi sumber daya. Tanah tidak lagi dipahami semata sebagai objek material melainkan diperebutkan oleh berbagai aktor dengan legitimasi yang saling bertentangan.

Konflik plasma di Tanjung Labu tidak diposisikan sebagai anomali atau kegagalan institusional belaka, melainkan mekanisme kekuasaan yang dijaga secara sistematis oleh konfigurasi relasi patron-klien dan struktur elit lokal. Konflik menjadi semacam aset politik yang dimanfaatkan untuk menegosiasikan posisi tawar, mengkonsolidasikan jaringan kekuasaan dan meregulasikan akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, konflik bukan sekedar konsekuensi dari hilangnya keadilan namun menjadi strategi untuk mengelola dan mengontrol proses politik desa.

Konflik dan ketimpangan berawal pada tahun 2001 yakni penandatanganan plasma 20% oleh perusahaan sawit hingga kini tidak pernah sama sekali terealisasikan. perusahaan sawit

yaitu PT SNS mulai merambah wilayah Pulau Lepar, menyingkirkan kepentingan petani lokal. Dalam kerangka ini yang dijelaskan oleh (Borras, 2007), konflik atas tanah tidak terjadi dalam ruang kosong melainkan konsekuensi dari kegagalan sistematis negara dan pasar dalam menjamin hak-hak agraria kelompok tani dan masyarakat adat. Negara melalui berbagai kebijakan dan kemitraan korporasi cenderung memberikan legitimasi atas penguasaan tanah skala besar tanpa mekanisme perlindungan efektif terhadap masyarakat lokal dalam menciptakan logika efisiensi dan skala ekonomi yang mendorong korporasi untuk mengkonsentrasikan lahan dan menggantikan fungsi sosial-ekologis tanah menjadi aset produksi komoditas global.

Dalam kasus Tanjung Labu, janji plasma 20% menjadikannya simbol utama dari ketimpangan struktural sekaligus manifestasi dari hilangnya fungsi akuntabilitas yang mengikat antara perusahaan dan masyarakat. Alih-alih membangun kemitraan yang setara, hubungan yang terjalin bersifat eksploitatif dan dominatif, dengan perusahaan tetap mempertahankan kontrol terhadap lahan tetapi masyarakat mengalami deprivasi akses secara fisik dan hukum. Lebih jauh konflik agraria telah dipolitisasi dan tidak lagi sebagai persoalan struktural yang hendak diselesaikan melalui kebijakan konkret, namun menjadi modal simbolik yang efektif untuk membangun legitimasi politik. Narasi perjuangan atas hak plasma dihasilkan melalui berbagai bentuk seperti pertemuan formal dan informal hingga retorika sebagai representasi perlawanan terhadap dominasi perusahaan.

Temuan diperkuat oleh argumen (Borras, 2010) bahwa agenda reforma agraria dalam masyarakat lokal sering kali diserap oleh elit politik sebagai wacana elektoral semata dan isu dimanfaatkan untuk dukungan dan basis kekuasaan. Politisasi ini menegaskan bahwa konflik agraria tidak lagi bergerak dalam ranah perlawanan struktural namun berhasil direduksi menjadi taktik pragmatis untuk kontestasi kekuasaan lokal. Politisasi ini membawa pada mobilisasi wacana perlawanan sebagai simbol politik dengan kandidat ikut bersama memperjuangkan dan menekan perusahaan untuk dapat merealisasikan kewajiban plasma 20% dan memperjuangkan hak masyarakat. Wacana ini menciptakan ekspektasi dan membentuk kesan bahwa konflik berada pada titik penyelesaian. Dan pasca kemenangan, narasi berhenti secara praktis dan berubah menjadi legitimasi pasif, yakni bahwa kepala desa tetap diasumsikan berpihak pada rakyat namun sama sekali tidak mendorong agenda reforma agraria. Ketika narasi perlawanan dibajak untuk kepentingan elektoral, masyarakat kehilangan otoritas untuk menuntut secara independen dan gerakan masyarakat menjadi tidak otonom karena diasosiasikan dengan tokoh politik tertentu yang kemudian mendinginkan isu setelah mendapatkan jabatan. Hal ini diperkuat oleh (Keller, 2013) konflik lahan agraria dimanfaatkan dan digunakan sebagai alat politik dalam pemilihan kepala desa dan elit lokal memiliki kekuatan dalam jabatan formal namun kemampuan untuk mengatur opini.

Konflik agraria dan isu plasma hanya muncul ketika menjelang pemilihan kepala desa dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh perusahaan sawit mendukung terhadap kandidat yang menyuarakan hak masyarakat karena masyarakat berharap adanya pemimpin ikut dalam memperjuangkan realisasi hak plasma. Fenomena ini menunjukkan beroprasinya praktik politik klientelisme. Politik dipraktekkan sebagai pertukaran jangka pendek antara patron dan klien. Kandidat menawarkan janji simbolik dan manfaat material untuk memperoleh dukungan politik, dan masyarakat memberikan loyalitas dalam bentuk suara, dukungan. Relasi ini tidak berlandaskan pada visi transformasi sosial tetapi pada kalkulasi pragmatis yang bersifat individual dan temporer. Desa Tanjung Labu, konflik agraria tidak menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan desa yang progresif melainkan menjadi bagian dari siklus politik

elektoral yang berulang. Lebih jauh ketika konflik di mobilisasi secara personal dan tidak melembaga masyarakat kehilangan jalur advokasi yang konsisten. Warga tidak lagi melihat isu plasma sebagai perjuangan kolektif melainkan janji pribadi tokoh tertentu yang dapat dilupakan setelah kontestasi selesai.

Pergeseran posisi elit yang sebelumnya oposisi kemudian menjadi koalisi kekuasaan dan salah satu dimensi yang paling krusial adalah dinamika perubahan posisi elit dari aktor oposisi menjadi bagian dari struktur kekuasaan formal desa. Transisi ini bukan semata perubahan peran administrasi namun juga mencerminkan pergeseran orientasi politik dan strategi representasi yang secara signifikan mempengaruhi arah konflik agraria. Dalam konteks Desa Tanjung Labu, fenomena ini terbukti menjadi salah satu faktor utama stagnasi penyelesaian konflik agraria. Pada fase pra-kekuasaan, sejumlah kandidat kepala desa mengartikulasikan diri sebagai oposisi terhadap dominasi perusahaan dengan mengangkat isu plasma 20% sebagai simbol ketidakadilan struktural. Mereka memposisikan diri sebagai antitesis terhadap elit sebelumnya yang dianggap pasif sekaligus mengklaim mandat moral dari warga untuk merealisasikan hak agraria yang tertunda. Namun tidak ditemukan inisiatif formal seperti penyusunan peraturan desa, pembentukan tim advokasi plasma atau pengawalan tuntutan justru sebaliknya sikap yang dimunculkan mengalami kecenderungan moderasi yang menempatkan mereka dalam posisi ambigu.

Fenomena mempertegas konsepsi (Keller, 1984) bahwa kelompok kecil dalam masyarakat yang tidak hanya menguasai alat kekuasaan formal, tetapi juga mendominasi arena makna dan legitimasi sosial dan elit memiliki kekuasaan bukan hanya dalam memerintah tetapi dalam menetapkan batas wacana yang dapat diterima dan diperjuangkan oleh publik.

Pergeseran posisi elit ini juga memperlihatkan ketegangan inheren dalam politik lokal yaitu ketidaksesuaian antara janji perlawanan simbolik dan logika teknokratik setelah masuk dalam pemerintahan. Disatu sisi elit membutuhkan isu untuk naik ke tampuk kekuasaan dan di sisi lain setelah berkuasa mereka terikat oleh struktur formal yang membuat mereka enggan mengambil risiko politik terhadap kekuatan korporasi. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Tanjung Labu tidak mandek karena ketiadaan data atau bukti pelanggaran melainkan karena transformasi elit dari agen perubahan menjadi bagian dari status quo.

5. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agraria di Desa Tanjung Labu, khususnya terkait janji plasma 20 persen, tidak hanya mencerminkan ketimpangan distribusi lahan, tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen politik lokal. Isu plasma dimobilisasi, dikelola, dan dinegosiasikan oleh elit desa dalam kontestasi Pilkadaes, sehingga mengalami pergeseran makna dari tuntutan struktural menjadi narasi elektoral yang hidup hanya pada masa kampanye lalu menghilang setelah pemilihan usai. Dalam kerangka politik agraria, kasus ini menunjukkan bahwa ketidakadilan akses tanah yang dialami masyarakat bukanlah konsekuensi teknis semata, melainkan bagian dari pertarungan politik antara negara, korporasi, dan masyarakat. Akan tetapi, alih-alih mendorong perubahan struktural, isu plasma justru dipolitisasi. Melalui praktik politik klientelisme, janji redistribusi tanah direduksi menjadi modal simbolik untuk memperoleh dukungan suara tanpa komitmen implementasi kebijakan yang nyata.

Lebih jauh, analisis tentang elit lokal memperlihatkan bagaimana tokoh desa yang semula tampil sebagai oposisi kemudian bertransformasi menjadi bagian dari struktur kekuasaan formal. Mereka tidak hanya menguasai posisi administratif, tetapi juga mengendalikan batas

diskursus publik dengan menentukan isu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus diredam. Akibatnya, konflik plasma tidak terselesaikan, melainkan dilembagakan sebagai aset politik yang menjaga stabilitas kekuasaan elit sekaligus mempertahankan dominasi perusahaan. Dengan demikian, konflik agraria di Tanjung Labu berada dalam lingkaran reproduktif: tidak selesai, tidak bergerak maju, dan tidak menghasilkan reforma agraria substantif. Sebaliknya, konflik menjadi bagian dari logika politik desa yang memprioritaskan stabilitas elit. Hal ini memperlihatkan bentuk kooptasi politik lokal, di mana aspirasi masyarakat dijinakkan melalui retorika prosedural, sementara substansi perjuangan tetap terpinggirkan.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Alexandro, R., Haridison, A., Thomas, O., Simpun, S., & Hariatama, F. (2023). Dissociative social interaction of plasma farmers and palm oil companies in East Kotawaringin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 474–486. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.66325>
- Andanni, J. T., Adnan, M., & Widayati, W. (2015). Konflik pengelolaan lahan plasma sawit di Kabupaten Seruyan tahun 2008–2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 351–360. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/9307>
- Aspinall, E. (2014). Indonesia's 2014 elections: Parliament and patronage. *Journal of Democracy*, 25(4), 96–110. <https://doi.org/10.1353/jod.2014.0070>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Baghdasaryan, M. (2017). The practice of political rights and patron–client relations: A case study of a party in Armenia. *Citizenship Studies*, 21(8), 1034–1051. <https://doi.org/10.1080/13621025.2017.1380603>
- Borras, S. M., Jr. (2007). *Pro-poor land reform: A critique*. University of Ottawa Press.
- Borras, S. M., Jr. (2009). Agrarian change and peasant studies: Changes, continuities and challenges – An introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 36(1), 5–31. <https://doi.org/10.1080/03066150902820297>
- Borras, S. M., Jr. (2010). The politics of transnational agrarian movements. *Development and Change*, 41(5), 771–803. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2010.01661.x>
- Borras, S. M., Jr., & Franco, J. C. (2010). Contemporary discourses and contestations around pro-

- poor land policies and land governance. *Journal of Agrarian Change*, 10(1), 1–32. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00243.x>
- Borras, S. M., Jr., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Kelihu, A. (2022). Political clientelism, family power and conflict permanence in Pilkada. *PCD Journal*, 10(1), 75–108. <https://doi.org/10.22146/pcd.v10i1.5417>
- Keller, S. (2013). *Beyond the ruling class: Strategic elites in modern society*. Transaction Publishers.
- Keller, S. I. (1984). *Penguasa dan kelompok elit: Peranan elit-penentu dalam masyarakat modern*. Rajawali.
- Khovivah, W. V., Sholehah, M., Saleh, M. A., Jamilah, A. U., & Mu'alimin, M. (2024). Definisi konflik dan pentingnya manajemen konflik dalam pendidikan. *Master Manajemen*, 2(4), 40–51. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i4.566>
- Lund, C. (2006). Twilight institutions: Public authority and local politics in Africa. *Development and Change*, 37(4), 685–705. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2006.00497.x>
- Lund, C. (2016). Rule and rupture: State formation through the production of property and citizenship. *Development and Change*, 47(6), 1199–1228. <https://doi.org/10.1111/dech.12274>
- Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: A conceptual introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*, 66(1), 91–113. <https://doi.org/10.2307/1959280>
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE.
- Yin, R. K. (2014). Case study research. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108–110. <http://dx.doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>